

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001. LN. 2001, No. 134, TLN No. 4150.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia*, UU No. 37 Tahun 2008. LN.2008, No.139, TLN No.4899.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU No. 19 Tahun 2019. LN. 2002, No. 137, TLN No. 4250.

### B. Buku

Anwary, Ichsan. *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Yogyskarta: Genta Publishing, 2018.

Arifin, Firmansyah dkk. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.

Ashiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

\_\_\_\_\_. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.



Gaffar, Janediri M. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Huda, UU Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: PT Reflika Aditama, 2020.

Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Yogyakarta: Intrans Publishing, 2016.

Isra, Saldi. *Lembaga negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Tauda, *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Press, 2011.

### C. Lain-lain

Ihsanuddin. "Yasonna: Dewan Pengawas untuk "checks and balances" di KPK", tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/09/13152521/yasonna-sebut-dewan-pengawas-untuk-check-and-balances-di-kpk>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 13:00 WIB.

KOMNAS HAM. "Tentang Komnas", tersedia di: <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 01.07 WIB.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial", tersedia di: <https://komisiyudisial.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 00.43 WIB.

MKRI.id. "Kewenangan dan Status Dewan Pengawas KPK tidak disebut dalam UU", tersedia di: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16599&menu=2>, diakses pada tanggal 10 Mei 202, pukul 15:00 WI



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 pada Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagian menimbang, hlm. 93.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. hlm 119.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 pada pengujian pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 344-345.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 pada pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.